

**RESPON BERBAGAI NEGARA KORBAN KEBIJAKAN MUSLIM TRAVEL BAN
PADA MASA KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP**

(2015-2017)

Oleh: Fitri Diah Pamungkas

20150510248

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Fitri.diah.2015@fisipol.umy.ac.id

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis respon yang dikeluarkan berbagai negara korban seperti Iran, Irak, Suriah, Sudan, Somalia, Yaman dan Libya terhadap kebijakan yang dikeluarkan Trump pada awal masa kepemimpinannya. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori politik luar negeri menurut K.J. Holsti dan William D. Coplin. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan pelarangan masuk atau melakukan perjalanan di Amerika Serikat bagi ketujuh negara tersebut. Kebijakan itu dinamakan Muslim Travel Ban. Penelitian ini berargumen bahwa Muslim Travel Ban merupakan kebijakan yang sangat diskriminan, sehingga memicu respon dari berbagai negara korban.

Abstract

The primary aim of this research is to analyze the response issue by various victim countries such as Iran, Iraq, Syria, Sudan, Somalia, Yemen and Libya to policies issued by the Trump at the beginning of his leadership period. This research is analyzed by using foreign policy theory from K.J. Holsti and William D. Coplin. The policy is ban for the seven countries to traveling in the United States. This policy is called Muslim Travel Ban. This research argument that Muslim Travel Ban is a discriminating policy, thus triggering responses from various victims of the countries.

Pendahuluan

Amerika Serikat merupakan negara maju yang pada tahun 2015-2017 digemparkan dengan pergantian presiden. Dimana pada tahun 2015 Amerika Serikat diramaikan dengan kampanye yang dilakukan oleh para calon presiden pada saat itu. Dimana calon presiden ke 45 dikandidatkan oleh Donald Trump dan Hillary Clinton. Pada masa kampanye, Trump lebih menyita banyak perhatian rakyat dibandingkan dengan Hillary. Dimana Trump pada masa kampanye cenderung vokal terhadap isu-isu terorisme dan Islam Radikal.

Selain mengenai isu Islam dan Muslim, Trump juga terkenal sebagai sosok dengan pernyataan-pernyataan provokatifnya. Mulai dari isu perang nuklir dan ancaman terbuka terhadap Korea Utara, supremasi kulit putih dan isu ras. Tidak heran apabila pada masa kampanye, Trump lebih menjadi sorotan masyarakat dari pada Hillary.

Lalu pada tahun 2016 semua mata terkagetkan dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Dunia belum berhenti terkagetkan oleh terpilihnya Trump sebagai Presiden AS yang ke 45, Trump kembali lagi mengagetkan dunia internasional pada tahun 2017. Dimana pada awal masa kepemimpinannya yaitu tepatnya pada akhir Januari 2017 Trump mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversi. Kebijakan tersebut adalah kebijakan Muslim Travel Ban.

Kebijakan ini adalah merupakan kebijakan larangan bagi tujuh negara mayoritas Muslim untuk memasuki atau melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Tujuh negara diantaranya adalah Iran, Irak, Suriah, Sudan, Somalia, Yaman dan Libya. Kebijakan ini tentu saja menuai banyak respon karena dianggap sangat diskriminasi dan tidak berkemanusiaan. Respon tersebut muncul dari banyak kalangan, mulai dari organisasi internasional, organisasi muslim dan tentunya respon dari berbagai negara korban.

Bahasan Utama

1. Kebijakan Muslim Travel Ban di Amerika Serikat

Islamophobia adalah sebuah sikap dari adanya prasangka buruk atau ketakutan irrasional yang berakibatkan pada kebencian dan rasa takut terhadap semua hal yang berkaitan dengan Islam ataupun Muslim. Islamophobia dipandang sebagai stereotip negatif yang mengakibatkan diskriminasi bagi Muslim dari kehidupan politik, sosial dan masyarakat. (Annisa, 2017)

Amerika Serikat adalah suatu negara yang memiliki power sangat besar dikancah dunia pasca runtuhnya kelompok komunis pada tahun 1990an yang sempat merajalela

dan menguasai Dunia saat itu. Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengintervensi atau melakukan ekspansi terhadap negara lain. (Istiqomah, 2017) Hal tersebut sangat dirasakan setelah terjadinya peristiwa yang menimpa gedung kembar WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 atau disebut juga sebagai peristiwa 9/11. Peristiwa 9/11 waktu itu menelan sebanyak 3000-an korban. Dengan peristiwa yang menimpa Amerika Serikat waktu itu membuat Islamphobia semakin terasa tersiar dipermukaan dunia ini terutama di Amerika Serikat. (Muhammad Qobidl 'Ainun Arif, 2000)

Peristiwa 9/11 membuat citra positif perkembangan Islam di dunia menjadi terkubur. Bahka Islam menjadi stereotip agama yang mengajarkan sebuah kekerasan, perang dan segala kerusakan yang menimpa dunia. Para jurnalis dan akademis juga ikut berperan dalam menggambarkan sesuatu hal yang negatif mengenai Islam seperti Islam merupakan suatu agama yang memiliki ancaman dalam bidang politik, peradaban dan demografi. Media pun juga ikut serta dalam menguburkan dalam-dalam citra positif Islam yang susah payah telah dibangun oleh umat Muslim. (Istiqomah, 2017)

Yang menjadi klimaks dari parahnya Islamphobia di Amerika Serikat yaitu dengan diangkatnya isu Islamphobia dalam masa kampanye yang dilakukan oleh para petinggi politisi. Hal tersebut dapat dilihat dari masa kampanye pada tahun 2015 di Amerika Serikat, dimana waktu itu Donald Trump yang mencalonkan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke 45 memilih untuk mengangkat isu Islamphobia untuk mendapatkan suara dan simpati dari penduduk Amerika Serikat. (Istiqomah, 2017)

Pada awal-awal bulan setelah Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, ia menepati janjinya pada masa kampanye untuk memproteksi Amerika Serikat dari Muslim. Dengan mengandalkan pernyataannya “ protecting the Nation from Foreign Terrorist entry into the Us” Trump mengeluarkan kebijakan resmi tersebut pada tanggal 20 Januari 2017, yaitu kebijakan Muslim Travel Ban.

Dimana Kebijakan Muslim Travel Ban adalah kebijakan berupa larangan masuk untuk imigran-imigran dari 7 negara mayoritas Muslim seperti Suriah, Iran, Irak, Libya, Somalia, Yaman dan Sudan. Larangan perjalanan bagi imigran 7 negara tersebut berlaku selama 90 hari, Trump juga menghentikan sementara program pengungsi untuk masuk ke Amerika Serikat selama 120 hari sejak diberlakukannya kebijakan tersebut. (Lamarque, 2017)

Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan perintah eksekutif Trump yang dikutip dari NBC News sebagai Berikut:

“The order suspends the entry of immigrants from seven Muslim-majority countries – Syria, Iran, Iraq, Libya, Sudan, Yemen and Somalia – for 90 days and stops all refugees from entering the country for 120 days” (Lamarque, 2017)

Keamanan nasional disebutnya sebagai faktor utama dari terbentuknya kebijakan Muslim Travel Ban. Sejak awal masa kampanyenya, Trump sudah menyatakan apabila ia akan mengeluarkan kebijakan tentang proteksi untuk para imigran. Hal tersebut dilakukan oleh Trump untuk membatasi ruang gerak warga asing yang berada di Amerika atau warga asing yang akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. (Goodman, 2017) Trump mengatakan apabila dengan membatasi ruang gerak para imigran merupakan satu tindakan yang baik untuk melindungi Amerika Serikat dari para imigran yang berpotensi untuk menghancurkan Amerika Serikat.

Selain alasan pembentukan kebijakan tersebut, Trump juga memiliki alasan tersendiri dalam menentukan tujuh negara tersebut sebagai negara yang dilarang memasuki negaranya. Diantaranya adalah pada masa kepemimpinan Obama, ternyata negara-negara tersebut sudah terdaftar atau masuk dalam kategori “negara yang diwaspadai”. Negara-negara di atas diidentifikasi memiliki organisasi teroris yang telah beroperasi secara signifikan di negara tersebut, dan negara-negara di atas disebut oleh teroris sebagai negara dengan tempat berlindung paling aman. (Goodman, 2017)

Selain itu Trump juga mengatakan apabila pemerintah dari 7 negara tersebut telah gagal menjalin hubungan baik dengan para pejabat Amerika Serikat. Aktivitas dan masalah teknis dalam mendokumentasikan teroris juga menjadi alasan pemilihan negara tersebut. (Josh Gerstein, 2018)

Negara Iran, Iran dianggap telah gagal dalam menjalin hubungan baik dengan para petinggi atau pejabat Amerika Serikat. Negara Libya, Libya dianggap tidak mampu melaporkan informasi yang terkait dengan keamanan publik dan terorisme. Negara Somalia, walaupun Somalia dianggap telah memenuhi kriteria untuk berbagi informasi, namun pemerintah Amerika Serikat mengidentifikasi Somalia sebagai surganya kelompok teroris. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan Somalia yang tidak stabil. (Josh Gerstein, 2018)

Lalu Suriah, Suriah dianggap juga telah gagal dalam bekerjasama dengan Amerika Serikat termasuk dalam pemberian informasi terkait dengan publik dan teroris. Negara Yaman, Yaman terlalu banyak mengalami kegiatan teroris baik di dalam maupun di sekitar wilayahnya. Yaman juga gagal dalam melaporkan dan mendokumentasikan wisatawannya dengan benar. (Josh Gerstein, 2018) Dan yang terakhir adalah Irak, Irak adalah negara yang sedang diserang oleh ISIS.

Selain alasan yang telah dijelaskan di atas, para imigran Muslim dari negara Timur Tengah dipandang berbeda dan asing oleh masyarakat konservatif Amerika Serikat apabila dibandingkan dengan imigran Yahudi. Kesulitan dalam proses integrasi dan asimilasi budaya antara imigran Muslim dari Timur Tengah ke budaya Amerika Serikat, dikarenakan citra negatif yang dibesar-besarkan oleh media. Sekelompok masyarakat Kristen konservatif melakukan diskriminasi karena mereka beranggapan apabila kaum Muslim merupakan ancaman terhadap eksistensi, kepentingan dan keamanan Amerika.

Dengan kesan yang diskriminasi kebijakan tersebutpun mulai dirasakan dampaknya bagi umat Muslim dari berbagai negara korban tersebut. Mulai dari penarikan dan pencabutan yang sedang melakukan pendidikan di Amerika Serikat, lalu pembatalan pernikahan dikarenakan status kewarganegaraan sang pengantin, penolakan terhadap pasien muslim yang sengaja datang untuk berobat di rumah sakit yang berada di Amerika Serikat, penahanan terhadap keluarga muslim yang ingin menemui keluarganya di Amerika Serikat dan penolakan terhadap sejumlah siswa muslim yang ingin meneruskan pendidikannya di Amerika Serikat.

Selain itu, para pejabat CBP bandara Internasional di seluruh wilayah Amerika Serikat mendapatkan instruksi langsung dari Gedung Putih untuk melarang masuk atau menahan umat muslim dari tujuh negara tersebut untuk masuk ke Amerika Serikat. Ribuan visa sah dan rakyat pemegang Green Card dari tujuh negara korban tersebut seketika ditolak untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Umat muslim dari ketujuh negara korban yang sudah berada seluruh bandara Internasional yang berada di Amerika Serikat ditahan oleh pihak bandara. Mereka diperlakukan tidak layak di bandara selama berjam-jam. Perlakuan tidak layak tersebut dirasakan oleh mereka karena mereka ditahan selama berjam-jam tanpa diberi makanan ataupun minuman dan tidak diberikan pemberitahuan secara resmi dari pihak bandara. Mereka diperlakukan sudah seperti layaknya teroris.

2. Respon Berbagai Negara Korban

Respon yang dikeluarkan atau yang dibentuk suatu negara dalam politik luar negeri negaranya bisa dalam bentuk aksi, reaksi militer, sikap diplomatik tertentu, ide atau gagasan, doktrin/ideologi, tindakan-tindakan persuasif dan kooperatif, strategi non block, dan sebagainya yang berhubungan dengan nasional yang berorientasinya ke luar negeri. Begitupula ketujuh negara korban yang merespon kebijakan Muslim Travel Ban dengan berbentuk atau berupa sikap diplomatik yang dikeluarkan masing-masing negara korban. Respon yang dikeluarkan negara satu dengan negara lain berbeda, maka penulis membagi respon ini menjadi tiga kelompok, diantaranya:

1. Negara Dengan Respon Membalas

Kebijakan Muslim Travel Ban sangat mendapatkan respon keras dari Iran dan Irak. Dimana kedua negara ini memilih untuk membalas kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump pada awal masa kepemimpinannya.

Yang pertama adalah negara Iran, dimana Iran mengeluarkan pernyataan yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negrinya yang berada di Taheran dimana Iran sangat mengecam aksi yang dilakukan oleh Donald Trump. Javad zarif yang merupakan Menteri Luar Negeri Iran, menyatakan apabila aksi Trump tersebut merupakan sebuah bentuk “penghinaan dan pelecehan” bagi Islam terutama bagi Iran.

Selain itu Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Iran yaitu Bahram Qassemi yang dikutip oleh Islamic Republic News Agency (IRNA) Qassemi menyatakan sebagai berikut:

“Republik Islam Iran, setelah dengan seksama meneliti keputusan baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Amerika, kami akan mengambil tindakan sebanding dan timbal balik”. (Antara/Reuters, 2017)

Pada Tanggal 3 Februari 2017 dikutip dari CNN Indonesia, Juru bicara Kementrian Luar Negeri Iran yaitu Bahram Qhassemi mengeluarkan menyatakan sebagai berikut:

“Setelah meninjau kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat, tim khusus bersama dengan Kementerian luar negeri akhirnya menolak visa bagi tim gulat Amerika Serikat” (Suastha, 2017)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump membuat pemerintah Iran tidak mempunyai pilihan lain selain melarang pegulat Amerika Serikat untuk ikut bertanding dalam turnamen yang diadakan di Teheran, Iran. Keputusan pertama yang dilakukan oleh pemerintah Iran menjadi tindakan pertama yang diambil oleh Iran sebagai balasan terhadap kebijakan Muslim Travel Ban. (TEMPO.CO, 2017)

Yang kedua adalah Irak, lima warga negara Irak didapati menjadi daftar penduduk yang dilarang untuk memasuki wilayah Amerika Serikat. Dimana lima warga tersebut dilarang menaiki pesawat dari Kairo yang akan menuju ke New York. Walaupun mereka telah memiliki visa AS, namun mereka tetap dilarang melakukan penerbangan ke Amerika Serikat. Sejumlah warga Irak tersebut dihadang dan kemudian dinaikan ke pesawat yang menerbangkan mereka kembali ke negara masing-masing. (Putsanra, 2017)

Dengan hal tersebut Irak sangat terhina atas tindakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Tindakan yang dilakukan oleh Trump membuat Irak mengambil keputusan

untuk membalas kebijakan Muslim Travel Ban seperti Iran. Menurut Irak kebijakan Muslim Travel Ban sangat melecehkan negaranya. Dengan itu mau tidak mau Irak harus membalas kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump pada awal masa kepemimpinannya. Dikutip dari The Washington Post pada 28 Januari 2017, Renas Jano yang merupakan Anggota komite urusan Kementrian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

“after the U.S. President’s decision to stop granting visas for Iraqi citizens, it is very likely thatt Iraq will stop granting U.S. citizens entry visas” (Erickson, 2017)

Ia juga mengatakan bila Irak membalas perbuatan Trump atas kebijakan yang dikeluarkan tentu saja akan berdampak pada tentara Amerika Serikat yang berada di Irak untuk memerangi ISIS. Selain itu Amerika Serikat juga akan sangat dirugikan, karena teradapat banyak perusahaan yang melakukan bisnis di Irak seperti contohnya perusahaan ExxonMobil, Shell dan perusahaan dibidang lainnya. (Erickson, 2017)

2. Negara Dengan Respon Menyayangkan

Pada bagian ini memiliki respon yang berbeda dari penjelasan diatas. Dimana Sudan memilih untuk tidak membalas tindakan dari perintah eksekutif Trump pada awal masa kepemimpinannya.

Sudan, dikutip dari Washington Post pada tanggal 28 Januari 2017 Sudan sangat menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Karena melihat rekam jejak hubungan antara Sudan dengan Amerika Serikat yang baru sedang berusaha menjalin hubungan baik kembali pada masa kepemimpinan Obama. Dimana pada masa kepemimpinan Obama, Obama setuju untuk mencabut embargo perdagangan 20 tahun yang diberikan untuuk Sudan. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump tentu saja membuat ketegangan kembali diantara kedua negara ini. (Erickson, 2017)

3. Negara Dengan Tidak Mengeluarkan Respon

Pada penjelasan dibawah ini, akan menjelaskan respon dari ke empat negara korban yang lain seperti Suriah, Somalia, Yaman, Libya yang memilih untuk tidak terlalu merespon kebijakan Muslim Travel Ban yang dikeluarkan oleh Trump.

Yaman, Suriah Libya dan Somalia sampai saat ini belum mengeluarkan pernyataan apapun mengenai kebijakan Muslim Travel Ban yang melibatkan negara mereka. Belum adanya pernyataan yang dirilis dari negara mereka dikarenakan keadaan negara mereka yang sedang tidak memungkinkan untuk merespon kebijakan tersebut.

Seperti negara Suriah, Suriah masih didera dengan krisis kemanusiaan, yang terancam mencapai level puncak. Maka tidak heran apabila pemerintah Suriah hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan apapun atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. (Kristanti, 2017) Walaupun pemerintah Suriah belum secara resmi mengeluarkan pernyataan tentang Muslim Travel Ban, justru respon dari masyarakat Suriah pun berdatangan sebagai unjuk suara dari adanya kebijakan tersebut.

Dimana warga Suriah sangat menyayangkan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Warga Suriah beranggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan yang sangat melawan kemanusiaan dan deskriminasi. (VOANews, 2018)

Yaman, pemerintah Yaman juga belum mengeluarkan pernyataan apapun atas kebijakan Muslim Travel Ban. Namun, kedutaan Yaman di Washington telah mengunggah sebuah peringatan di Facebook untuk masyarakat Yaman yang akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, serta memberi peringatan agar mereka tidak melakukan perjalanan ke Amerika Serikat sampai keadaan memungkinkan. (Kristanti, 2017)

Sedangkan Libya sama dengan Yaman dan Suriah, dimana negara ini juga belum mengeluarkan pernyataan sebagai respon atas tindakan Trump yang melibatkan negara mereka. Karena seperti informasi yang dilansir dari Liputan6 bahwa Libya sekarang sedang mengalami kehancuran akibat dari perang saudara yang menimpa negaranya. (Kristanti, 2017) Dan Somalia, sampai saat ini belum ada pernyataan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintahan Somalia dalam menanggapi kebijakan Muslim Travel Ban.

Respon yang dikeluarkan berbagai negara korban merupakan hasil dari kebijakan luar negeri yang telah dipertimbangkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor diantaranya adalah keadaan politik domestik negaranya, kemampuan ekonomi dan militernya dan yang ketiga adalah faktor keadaan lingkungannya. Dibawah ini akan menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut ditujuh negara korban.

1) Keadaan Politik Dalam Negeri

a. Iran

Iran merupakan negara yang menganut sitem Republik. Sistem Republik adalah sistem politik yang banyak dianut di kawasan Timur Tengah salah satunya Iran. Iran merupakan salah satu negara dengan sistem Republik yang menerapkan sistem politik multi patai.

Dengan menerapkan sistem multi partai dapat dikatakan apabila Iran memiliki berbagai kubu. Dengan beragam kubu yang dimiliki oleh Iran, banyak belah pihak yang mengatakan apabila Iran akan mengalami banyak kesusahan dalam menjalankan sistem politik dinegaranya. (Prastyo, 2017) Namun, setelah terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden Iran selanjutnya, seperti memberikan harapan baru bagi rakyat Iran. Hassan Rouhani dikenal sebagai sosok yang memiliki moderat dan hal tersebut diterapkan saat ia menjabat sebagai presiden Iran. (Phoenna, 2016)

b. Irak

Pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein, suasana perpolitikan di Irak pun terasa berubah. Perubahan suasana pasca masa kepemimpinan Saddam Hussein pun berdampak terhadap pemetaan kekuatan-kekuatan politik Irak. Begitupula sebaliknya, dimana kekuatan-kekuatan politik mempengaruhi suasana perpolitikan di Irak. Pasca berakhirnya masa kepemimpinan Saddam Hussein muncullah kekuatan-kekuatan politik baru yang lebih adaptif, walaupun sesungguhnya kekuatan-kekuatan politik di Irak tetap berafiliasi dengan tiga kelompok utama masyarakat diantaranya Sunni, Syiah dan Kurdi. Proses politik Irak sendiri lebih menguntungkan bagi kelompok Kurdi dan Syiah, dimana Sunni lebih merasa dirugikan. (Yumitro)

Hal tersebut terjadi karena Kurdi sendiri lebih diuntungkan pada bidang politik dan budaya karena pada dasarnya kelompok Kurdi memiliki suara yang lebih dominan dalam pemilu. Lalu Syiah, Syiah lebih diuntungkan karena Syiah sendiri menjadi kelompok yang lebih dominan dalam pemerintahan Irak. Dengan kondisi yang seperti itu dan kelompok Sunni yang merasa dirugikan, tentu saja hal ini memicu konflik terhadap antar 3kelompok ini di Irak.

Perubahan suasana perpolitikan di Irak sendiri justru membuat struktur masyarakat terpecah belah, dan membuat institusi negara melemah. Pemerintahan yang dibentuk pasca runtuhnya rezim justru menghasilkan pemerintahan yang tidak legitimate.

c. Suriah

Suriah merupakan negara dengan bentuk negara Republik. Dengan bentuk negara Republik, banyak orang yang mengartikan apabila Suriah

menganut sistem demokratis. Tapi pada nyatanya Suriah jauh dari kata demokratis.

Di bidang politik sendiri, Partai Ba'ath adalah partai yang menguasai dan mengontrol perpolitikan Suriah sejak tahun 1963 sampai saat ini. Dengan dikuasainya perpolitikan Suriah oleh partai Ba'ath tentu saja membuat kelompok politik lainnya hanya memiliki pengaruh yang sedikit di Suriah. (Rosyada, 2017)

Awalnya masyarakat Suriah hanya mengikuti alur tersebut, namun semakin kesini para masyarakat terutama dikalangan pemuda mulai meresahkan dampak yang terjadi atas kepemimpinan Bashar Al-Assad. Dimana mereka merasakan apabila pada masa kepemimpinan Bashar Al-Assad, ia terlalu mengekang kebebasan rakyatnya. Mulai sejak itu beberapa demonstrasi pun berdatangan terus menerus dan membuat nama Suriah terangkat pada tahun 2011 akibat adanya perang sipil yang diakibatkan dari adanya krisis politik.

d. Sudan

Pemisahan Sudan Selatan dari Sudan sendiri memicu berbagai masalah antar kedua negara tersebut. Masalah perminyakan dan perbatasan wilayah menjadi masalah yang menegangkan bagi kedua negara tersebut. Sudan juga merupakan negara yang telah lama mengalami berbagai konflik. Mulai dari perang saudara, dimana perang ini telah mengalami dua putaran peperangan antara utara dengan selatan. Selain perang saudara Sudan juga mengalami konflik berkelanjutan di wilayah barat Darfur.

e. Somalia

Somalia merupakan negara yang dikatakan oleh PBB sebagai failed state. Selain itu Somalia juga negara dikawasan Afrika yang sering diasosiasikan dengan kejadian kekerasan, perebutan sumber daya alam, sengketa perbatasan, irredentisme, kekacauan, budaya konflik dan kemiskinan. Somalia dianggap sebagai failed state karena negara ini tidak memiliki otoritas pusat yang terakui dan tidak adanya mata uang nasional.

f. Yaman

Yaman merupakan negara yang tidak stabil diberbagai bidang. Mulai dari bidang ekonomi, sosial dan perpolitikannya. Yaman juga merupakan negara yang mengalami krisis kekuasaan. Berbagai konflik sering menimpa negara ini. (Maulana, 2015) Krisis kekuasaan dinegara ini dapat

dilihat pada masa kepemimpinan Ali Abdullah Saleh, dimana ia telah menjabat sebagai pemimpin Yaman selama 32 tahun.

g. Libya

Runtuh dan tewasnya Gaddafi membuat lembaran baru dalam dinamika perpolitikan Libya. Proses transisi politik di Libya terasa cepat karena adanya National Transition Council dan dukungan dari PBB sehingga proses transisi lebih cepat dari dugaan sebelumnya. Adanya pelaksanaan pemilu dan pembentukan konstitusi baru pada tahun 2012 menjadi bukti bahwa proses transisi ini benar adanya. Pada tanggal 7 Juli 2012 diselenggarakannya pemilu oleh NTC.

2) Kemampuan Ekonomi dan Militer

a. Iran

Terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden Iran selanjutnya, semua keadaan buruk di Iran berubah. Sejumlah harapan muncul pasca terpilihnya Rouhani sebagai presiden Iran. Rouhani berhasil menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat dan dunia internasional. Ia berhasil meyakinkan banyak negara atas kepemilikan nuklir di negaranya. Dengan usaha yang dilakukan oleh Rouhani waktu itu, membuat sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Iran menjadi di cabut. Pencabutan sanksi ekonomi tersebut membuat Iran bangkit kembali dari keterpurukannya. (Phoenna, 2016)

Pada bidang militer, terpilihnya Rouhani membuat Iran memiliki harapan baru. Dimana Iran mampu melakukan kerjasama lagi dengan negara-negara yang memiliki kekuatan di bidang militer. (Phoenna, 2016)

b. Irak

Setelah masa penggulingan Saddam Hussein, perekonomian dinegara Irak tahun demi tahun makin membaik. Segelontoran bantuan diberikan oleh Amerika untuk membangun negara Irak kembali. Dana yang diberikan oleh Amerika sejumlah \$60 miliar dan \$2,4 miliar untuk perbaikan dibidang pengairan, listrik, dan sektor lainnya. (Nathaniel, 2017)

Dibidang militer, pasca invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak sendiri membuat peran Amerika Serikat sangat penting di Irak. Diketahui apabila tentara Amerika dengan jumlah yang banyak berada di Irak, hal ini dikarenakan Amerika ingin memberikan bantuan terhadap Irak dalam memerangi kelompok teroris yang berada di Irak.

c. Suriah

Suriah merupakan negara yang cukup lambat dalam pertumbuhan ekonominya. Suriah juga bukan merupakan negara yang memiliki minyak dengan jumlah banyak seperti negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. (Rosyada, 2017) Selain itu Suriah juga merupakan negara yang memiliki masalah dalam sumber daya manusianya, jumlah SDA di Suriah sendiri tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan SDMnya dari tahun ke tahun. (Muhammad M. , 2016) Selain itu permasalahan yang dialami Suriah atas sumber daya manusianya merupakan dampak dari adanya perang sipil yang berkelanjutan, sehingga menghambat proses pembelajaran penduduk Suriah dan menghambat mereka semua dalam berkreasi dan berinovasi. Dengan terbatasnya ketrampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di Suriah membuat perkembangan industri di Suriah juga turut terhambat. (Rosyada, 2017)

Dibidang militer, Suriah memiliki jumlah personel tentara yang cukup banyak, Suriah juga memiliki keamanan udara yang sangat ketat. Didapati data apabila kekuatan Suriah di udara masuk dalam peringkat 25 di dunia. Negara ini memiliki 461 unit udara yang terdiri dari 165 jet tempur, 168 helikopter dan berbagai kendaraan tempur lainnya. (Dian)

d. Sudan

Pemisahan Sudan Selatan dari Sudan membuat perekonomian Sudan hancur. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Sudan untuk mengupayakan keseimbangan perekonomian dinegaranya, namun semua terasa sia-sia. (fanack.com, 2016) Selain itu sanksi komprehensif yang dijatuhkan oleh AS terhadap Sudan dengan alasan politik lebih berdampak pada perekonomian Sudan.

Dibidang militer, Sudan merupakan negara yang sedang gencang-gencangnya melakukan perubahan dibidang militernya sejak tahun 2017. Hal tersebut dibuktikan dengan dijalinnya hubungan antara Sudan dengan Rusia di bidang militer.

e. Somalia

Mulai tahun 1970-an sampai saat ini Somalia mengalami kesulitan dibidang perekonomian. Hal tersebut terjadi karena kemarau panjang yang menimpa Somalia. Selain itu kesulitan ekonomi juga dikarenakan keberadaan pengungsi dari Ethiopia. Dengan keadaan perekonomian

Somalia yang bergantung pada bidang pertanian, tentu saja buruknya cuaca yang menimpa Somalia berdampak pada perekonomian negaranya. (ilmupengetahuanumum.com) Dengan krisis ekonomi yang berdampak pada krisis kelaparan yang melanda Somalia membuat Somalia bergantung pada bantuan-bantuan dari negara lain.

Dibidang militernya, sebelum tahun 2012 negara ini awalnya tidak memiliki angkatan udara, hingga akhirnya Italia bersedia membantu Somalia untuk membangun angkatan udara. Sedangkan dibidang angkatan lautnya, Somalia sempat mengalami disintegrasi besar-besaran pada abad 20. Sebelum pada akhirnya tahun 2012 Uni Emirat Arab memberi bantuan sebesar 1 juta dolar AS untuk memperkuat angkatan laut di Somalia. (TRIBUNnews, 2018)

Selain itu pada tahun 2017 Somalia pun juga mendapatkan bantuan dari Turki yaitu dengan pemberian pelatihan terhadap tentara Somalia. Dimana Turki membuka pangkalan militer terbesarnya di ibu kota Somalia. Dimana pangkalan ini digunakan untuk memberikan pelatihan terhadap tentara Somalia.

f. Yaman

Konflik berkepanjangan yang melanda Yaman membuat keadaan dinegaranya tidak karuan. Didapati data dari Kementrian Perdagangan dimana menyatakan apabila ditahun 2015 Yaman harus mengimpor 90% kebutuhan penduduknya dari luar, terutama dibidang pangan. Hal tersebut terjadi akibat konflik yang berkepanjangan di negaranya, sehingga Yaman tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Pada tahun 2015 Yaman mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai angka -21%. Dengan penurunan kegiatan ekonomi yang sangat drasti tentu saja membuat perekonomian di Yaman melemah. (Firdaus, 2017)

Dibidang militer, Yaman merupakan negara yang sering membelanjakan uang negaranya untuk belanja alat pertahanan. Anggaran pertahanan di Yaman sendiri meningkat dari tahun ke tahun. (Firdaus, 2017) Namun Yaman merupakan negara dengan kelas menengah kebawah dalam jumlah personel militernya. Dengan keterbatasan jumlah militernya tentu saja berpengaruh pada kestabilan negara Yaman.

g. Libya

Setelah tahun 2011 Libya mengalami revolusi. Peristiwa besar melanda negara tersebut dan membuat kehancuran menimpa negaranya. Peristiwa tersebut diantaranya terjadi perang saudara, intervensi asing, dan penggulingan rezim Gaddafi. Dengan peristiwa yang menimpa Libya, Libya harus membayar semua peristiwa tersebut. (Firmansyah, 2015)

Peristiwa pada tahun 2011 menyebabkan kehancuran hampir diseluruh rumah dan bisnis penduduk Libya. Dengan itu atusan ribu penduduk Libya memilih untuk mengungsi, karena mereka sudah tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Semua pengungsi menggantungkan hidupnya pada bantuan dari badan amal yang terdapat di kamp-kamp darurat. (Firmansyah, 2015)

Seluruh proyek insfrastruktur pun terhenti, walaupun telah berada di tahap akhir. Para investor asing yang berada di Libya sebelum tahun 2011 pun berbondong-bondong meninggalkan Libya pada tahun 2011. Para investorpun tidak memiliki niatan untuk kembali ke Libya dalam waktu dekat. (Firmansyah, 2015)

Dibidang militernya, Libya merupakan negara yang keadaan militernya tidak dapat dikatakan bagus. Negara ini memiliki angkatan udara, angkatan darat dan juga angkatan laut, namun sayangnya Libya tidak memiliki perlengkapan senjata yang memadai. Dimana Libya sendiri tidak memiliki peralatan persenjataan yang memumpuni dan lengkap. Sehingga membuat negara ini juga akan lebih kesusahaan dalam mengamankan negara mereka. (SINDONEWS, 2012)

3) Keadaan Lingkungan Internasional

Keadaan lingkungan internasional negara mereka sangat penting ketika negara mereka membentuk sebuah kebijakan guna merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Berbagai negara korban dari kebijakan Muslim Travel Ban memiliki dukungan dari banyak negara maju di dunia. Negara-negara tersebut seperti, Inggris, Perancis, Jerman, Indonesia. (KOMPAS.com, 2017)

Dimana negara-negara yang memberi dukungan dan siap menerima pengungsi dari ketujuh negara korban tersebut sangat menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Mereka mengatakan apabila keputusan yang dikeluarkan oleh Trump sangat tidak berperikemanusiaan. (KOMPAS.com, 2017)

Selain beberapa negara maju yang memberi dukungan terhadap ketujuh negara tersebut, beberapa organisasi internasional juga mengupayakan agar warga dari ketujuh negara tersebut mendapatkan hak mereka yang semestinya. Organisasi internasional tersebut diantaranya, Amnesty Internasional, ACLU, CAIR dan yang lainnya. Dan juga FBI sedang melakukan beberapa penyelidikan terkait terrorisme yang ada di Amerika Serikat, dan menyelidiki apakah alasan Trump menegenai pelarangan masuk dari tujuh negara tersebut benar terbukti. (Saju, 2017)

Kesimpulan

Politik luar negeri dapat diartikan sebagai sebuah respon suatu negara sebagai upaya perlindungan serta pencapaian kepentingan nasionalnya, serta sebagai refleksi dari sebuah arah kebijakan dan perilaku politik suatu negara terhadap negara lain. Respon yang dikeluarkan oleh suatu negara bisa dalam berbagai macam bentuk, diantaranya dalam bentuk aksi, reaksi militer, sikap diplomatik tertentu, ide atau gagasan, doktrin atau ideologi, tindakan-tindakan persuasif dan kooperatif, strategi non block, dan yang lainnya yang berhubungan dengan nasional yang berorientasikan teradap politik luar negeri.

Selain itu dalam membentuk sebuah politik luar negeri, suatu negara akan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum membentuk sebuah politik luar negeri. Faktor pembentuk politik luar negeri suatu negara diantaranya ada faktor kondisi politik dalam negeri suatu negara, lalu keadaan ekonomi, kekuatan militer suatu negara dan yang terakhir adalah faktor lingkungan internasional.

Begitu pula dengan ketujuh negara korban dari kebijakan Muslim Travel Ban seperti Iran, Irak, Suriah, Sudan, Yaman, Libya dan Somalia dimana Iran dan Irak memilih untuk merespon dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump, sebagai arah refleksi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Lalu Sudan, dimana negara ini memilih untuk hanya mengeluarkan beberapa statement penyayangan. Dan keempat negara yang lain yaitu Suriah Somalia, Yaman dan Libya memilih untuk tidak mengeluarkan respon apapun mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump.